

## ABSTRAK

Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan konstitusinya, dan salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan jaminan hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi yang tercantum dalam Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk hak untuk mendapatkan informasi hukum. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Nasional (JDIHN) adalah sebagai wujud Pemerintah dalam memenuhi hak mendapatkan informasi hukum sehingga pelaksanaan Peraturan Presiden ini haruslah efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 di Kabupaten Tegal dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya serta bagaimana solusi untuk mengatasinya. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data dengan observasi dan studi kepustakaan, sedangkan analisa data yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat dilihat dari ada tidaknya organisasi yang melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan dalam menjalankan tugas dan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) harus sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dapat dinilai cukup efektif karena sudah terbentuknya organisasi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yaitu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dan dikuatkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 98 Tahun 2017, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tegal sudah sesuai berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, meskipun belum sempurna karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta komitmen pimpinan dalam pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum.

Kata kunci : *efektifitas, jaringan dokumentasi dan informasi hukum.*

## ABSTRACT

Indonesia is a State of Law based on its constitution, and one of the characteristics of the State of Law is the recognition and guarantee of human rights, one of which is the right to obtain information contained in Article 28 letter f of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia including the right to obtain information law. The issuance of the Presidential Regulation Number 33 of 2012 concerning the National Legal Documentation and Information Network (JDIHN) is a manifestation of the Government in fulfilling the right to obtain legal information so that the implementation of this Presidential Regulation must be effective.

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the Management of Legal Documentation and Information Network (JDIH) based on the Presidential Regulation Number 33 of 2012 in Tegal District and the factors that influence its effectiveness and how to overcome it. The type of research used in this study is analytical descriptive research with normative juridical approach, and data collection techniques with observation and literature study, while the analysis of the data used is qualitative.

The results showed that the Management of Legal Documentation and Information Network (JDIH) can be seen from the existence of an organization that carries out the Management of Legal Documentation and Information Network (JDIH) and in carrying out the duties and functions of the legal Documentation and Information Network (JDIH) must be in accordance with the standard stipulated by legislation. Management of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) in Tegal Regency in accordance with Presidential Regulation No. 33 of 2012 can be considered quite effective because the organization of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) is established, namely the Legal Section of the Tegal District Secretariat which is formed based on the Regional Regulation Number 12 of 2016 and strengthened by Tegal Regent Regulation Number 98 of 2017, in carrying out its duties and functions, the Tegal Regency Legal Documentation and Information Network (JDIH) is in accordance with the provisions of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 02 of 2012 concerning Standardization of Technical Management of Legal Documentation and Information, although not perfect because it is influenced by several factors such as regulatory factors, human resources, facilities and infrastructure and leadership commitment in the management of legal documentation and information networks (JDIH)

.Keywords : *effectiveness, legal documentation and information networks.*